



Suasana Pasar Besar Ngawi.

Cegah Kebocoran PAD DPPTK Terapkan Retribusi Pasar Besar Ngawi Non-Tunai

Ngawi, Memorandum

Pemkab Ngawi resmi memulai penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Besar Ngawi sejak Juli 2026.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan mencegah kebocoran potensi pendapatan daerah.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan, bahwa mulai bulan Juli diterapkan pembayaran retribusi sepenuhnya menggunakan mekanisme non-tunai (digital).

“Ini sebagai bentuk transparansi sekaligus mencegah adanya kebocoran pontensi pendapatan daerah,” katanya.

Ia menuturkan, pengurangan retribusi pelayanan pasar nantinya untuk menunjang operasional, perawatan, serta perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) di dalam kawasan Pasar Besar Ngawi.

“Kenapa baru kali ini diterapkan, karena Pemkab baru mengantongi izin resmi dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) pada akhir 2025,” terangnya.

Dijelaskan Nilam, Pasar Besar sendiri hingga kini belum diserahterimakan oleh Kementerian PU ke Pemda Kabupaten



Kepala DPPTK Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingrum

Ngawi lantaran perubahan nomenklatur di Kementerian.

“Pemkab Ngawi sudah bersurat ke Kemkeu untuk memohon petunjuk apakah diperbolehkan menarik retribusi pelayanan umum di aset yang belum sepenuhnya diserahterimakan,” jelasnya.

Ditambahkan, sejauh ini pendataan ulang yang dilakukan DPPTK Ngawi mencatat sekitar 958 pedagang di Pasar Besar Ngawi dengan target PAD senilai Rp 450 juta yang diberlakukan pada Juli 2026 ini.

“Sistem pembayaran non-tunai ini yang diterapkan di Pasar Besar melalui kerja sama dengan Bank Jatim,” pungkasnya. **(ris/dik/nov)**



Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Ngawi Arif Syaifudin

DPMD Ngawi Targetkan Perubahan Perda tentang Kades

Ngawi, Memorandum

Guna persiapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, Pemkab Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat mulai menyiapkan perubahan peraturan kades.

Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang kemudian dipertegas melalui aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2026.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Ngawi Arif Syaifudin menjelaskan, bahwa saat ini Pemkab Ngawi mulai menyiapkan regulasi dan tahapan pelaksanaan pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.

Salah satu dengan menyiapkan perubahan Perda tentang Kades agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2026. “Dengan adanya regulasi baru, Pemkab Ngawi mulai menyiapkan perubahan Perda tentang Kades di Ngawi,” katanya.

Arif mengatakan, sebanyak 178 kades di Kabupaten Ngawi dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2027.

Ada beberapa poin yang harus dilakukan perubahan tentang Kades. Perubahan tersebut, di antaranya masa jabatan kades yang semula 6 tahun dengan aturan maksimal 3 periode diubah menjadi 8 tahun per periode dengan batas maksimal 2 periode sehingga total masa jabatan paling lama 16 tahun.

Kemudian perangkat desa yang ingin mencalonkan diri dalam pilkades diwajibkan cuti saat pencalonan, dan wajib mengundurkan diri secara resmi jika sudah ditetapkan sebagai calon tetap kades.

Sedangkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan maju dalam pilkades, wajib mengajukan izin kepada bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Untuk itu, meskipun perubahan regulasi memiliki waktu yang sangat cukup akan tetapi DPMD Ngawi menargetkan selesai dan diparipurnakan tahun ini karena setelah perda perubahan ini ditetapkan, maka regulasi akan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan pilkades serentak.

“Perubahan Perda tentang Kades ini kita targetkan selesai dan diparipurnakan pada tahun ini,” pungkasnya. **(ris/dik/nov)**

MADIUN-NGAWI

Pemkot Madiun Moratorium Program Pinjaman LKK

Madiun, Memorandum

Pelaksanaan program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dihentikan Pemkot Madiun.

Hal itu menindaklanjuti rencana skema pengalihan pengelolaan pinjaman LKK melalui Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Moratorium tersebut dilakukan guna mencari skema pengelolaan baru yang aman secara regulasi dan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan, pemkot masih merumuskan pola terbaik untuk kelanjutan program. Sejak ini, konsultasi telah dilakukan dengan BPK dan bakal dilanjutkan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Semua-



Gedung Bank Daerah Kota Madiun.

lagi moratorium. Kami mencari formula yang terbaik,” katanya, Minggu (9/8).

Menurut Bagus, salah satu opsi yang dikaji adalah mengalihkan pengelolaan pinjaman LKK melalui BPR Bank Daerah. Skema tersebut dipertimbangkan agar mekanisme penyaluran maupun pengelolaan dana memiliki landasan hukum yang jelas.

“Salah satunya nanti kami arahkan semuanya

ke BPR Bank Daerah. Supaya secara legal aman pada saat pinjaman,” kata mantan anggota DPRD Kota Madiun tersebut.

Meski begitu, Bagus menyebutkan rencana itu masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Pemkot perlu memastikan mekanisme perbankannya sesuai regulasi melalui konsultasi dengan OJK.

Selama proses tersebut

langsung, aktivitas LKK dihentikan sementara. “Saat ini *off* dulu,” tegas Bagus.

Dia belum memastikan kapan program kembali berjalan. Menurut Bagus, kesiapan BPR dan hasil kon-

sultasi dengan OJK akan menjadi pertimbangan sebelum skema baru diterapkan. “Makanya butuh waktu, komunikasi dengan OJK,” pungkasnya. **(ggi/nov)**

DPRD Kota Madiun Minta Kredit LKK Dipilah sebelum Dialihkan

Madiun, Memorandum

Rencana pengalihan pengelolaan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) ke Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun disorot DPRD.

Kalangan legislatif meminta seluruh dana, piutang, hingga kredit bermasalah dibedah sebelum proses *take over* dilakukan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun Lanjar Agus Susilo mengatakan, pemetaan diperlukan untuk memilah portofolio sehat dan bermasalah. Sebab, pengalihan kredit macet berisiko

mengerek non-performing loan (NPL) sekaligus membebani kinerja BPR.

“Harus dipilah-pilah. Jangan sampai nanti ngopér borok. Kami tunggu hasil investigasinya, permasalahannya seperti apa, dan datanya bagaimana,” ujarnya, Minggu (9/8).

Menurut Lanjar, rencana pengalihan tersebut tidak perlu dipaksakan jika hasil kajian menunjukkan risiko besar. Apalagi, perubahan badan hukum BPR menjadi perseroan terbatas (PT) membuat kesehatan perusahaan

semakin penting untuk menjaga kepercayaan pemodal.

“Kalau memang tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Kalau dialihkan ke BPR harus benar-benar sehat. Barangnya KW 1, bukan KW 2 atau KW 3, dan ada jaminan,” kata politisi PSI tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yhusianto menilai penghentian sementara program LKK dapat dimanfaatkan untuk melakukan *stock opname* dan inventarisasi menyeluruh.

Pemetaan itu harus mampu menunjukkan posisi dana permanen yang selama ini dikelola LKK. Mulai dana tersedia, piutang, hingga pinjaman lancar dan macet.

“Duitnya masih ada atau tidak, berapa, posisinya di mana. Statusnya aman atau tidak, macet atau tidak. Itu yang perlu dievaluasi,” ungkap Ngedi.

Karena pelaksanaan program LKK dihentikan sementara, Ngedi menilai pemkot juga tidak semestinya membekukan target pendapatan asli daerah (PAD) seperti sebelumnya. Sebab, LKK praktis tidak leluasa memutar dana selama moratorium.

Terkait pengalihan ke BPR, dia meminta hanya portofolio sehat yang dipertimbangkan

untuk diambil alih. Sedangkan kredit bermasalah harus memiliki skema penyelesaian tersendiri.

“Pelayanan harus tetap jalan dan lebih baik, tetapi jangan mindah borok. Jangan sampai dipindahkan ke sana, malah BPR-nya yang keteteran,” tegasnya.

DPRD juga meminta skema *take over* memenuhi regulasi perbankan dan dikonsultasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persoalan tersebut bakal kembali dicermati dalam pembahasan anggaran 2027.

Ngedi berharap pemetaan dan penyelesaian persoalan LKK rampung paling lambat akhir tahun. “Desember harus klir. Supaya mulai Januari 2027 pemerintah sudah tidak mengelola lagi LKK,” pungkasnya. **(ggi/nov)**

Jelang Pemilu 2029, Golkar Kabupaten Madiun Mulai Panasi Mesin Politik Target Rebut 12 Kursi dan Incar Posisi Ketua DPRD

Madiun, Memorandum

DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun mulai memanasi mesin-mesin untuk menyambut agenda-agenda besar di tahun 2029 mendatang.

Sebanyak belasan Pengurus Kecamatan (PK) dan ratusan Pengurus Desa/Kelurahan (PK/PD) telah dibentuk dan disahkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun, Minggu (9/8).

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Ali Mufti mengatakan, tujuan Rakerda kali ini adalah untuk merapatkan barisan pengurus Partai Golkar di daerah.

Termasuk menyatukan visi-misi guna memenangkan pilpres, pilkada, dan pileg tahun 2029/2030.

“Kita ingin menyatukan langkah dalam rangka menatap masa depan dalam kontestasi politik ke depannya,” katanya.

Berkaitan dengan tujuan utama partai, Ali berpesan kepada para pengurus partai di daerah untuk tegak lurus melaksanakan kepentingan partai. Artinya, melakukan kampanye secara menyeluruh terhadap kader-kader partai dari daerah, Provinsi Jawa Timur, hingga



Kegiatan Rakerda DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun pada Minggu (9/8).

Nasional.

“Kampanye-nya coblos DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Timur, dan DPRD Kabupaten Madiun dari Partai Golkar. Harus selaras,” pesannya.

Saat ditanya mengenai goal partai dalam perebutan kursi legislatif, Ali memilih untuk tidak membeberkan target-target partai ber lambang Pohon Beringin itu. Namun, secara terangan ia memilih Hari Wuryanto untuk kembali maju menjadi Bupati Madiun pada Pilkada 2030.

“Bagaimanapun pilkada

nanti entah terbuka maupun tertutup, kamu tetap memberikan dukungan penuh kepada senior kita Pak Hari Wuryanto,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun Mashudi secara terang-terangan menyebutkan target perolehan kursi pada tahun 2029 mendatang.

Menurut Mashudi, setidaknya ada 12 kursi DPRD Kabupaten Madiun, dua kursi DPRD Provinsi Jawa Timur, dan dua kursi DPR RI. Sekaligus, mengusung Hari Wuryanto sebagai



Bupati Madiun.

“Karena mimpi kita adalah mengawinkan legislatif dan eksekutif. Artinya, dua-duanya berasal dari Partai Golkar,” sebutnya.

Mashudi mengaku, serangkaian strategi politik sudah mulai disiapkan DPD untuk tancap gas pada Pemilu selanjutnya. Seperti, menyolidkan fondasi partai, menggerakkan mesin-mesin partai, dan menghadirkan beragam inovasi yang menarik minat masyarakat.

“Golkar Madiun adalah harus solid dan menang. Bagi

kita, *tagline* tersebut memang Golkar harus menang dan dapat menyejahterakan masyarakat,” terangnya.

Di tempat yang sama, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan kesiapannya untuk diusung kembali pada kontestasi pilkada tahun 2030. Menurutnya, keputusan partai merupakan hal yang mutlak.

“Itu kan perintah partai, kita tidak bisa menolak. Kita Partai Golkar harus tetap solid untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Madiun,” tandasnya. **(aji/nov)**